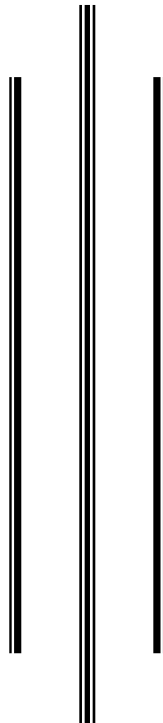




**RANCANGAN RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2023**





KEPUTUSAN ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT

Nomor : Kep/3/I/REN.2.3./2022

Tentang

RANCANGAN RENCANA KERJA ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH SUMATERA BARAT

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu menetapkan Keputusan ini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 3. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
 7. Keputusan Kapolda Sumbar Nomor: Kep/347/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Renstra Polda Sumbar Tahun 2020-2024.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kapolda Sumbar Nomor: Kep/ /I/2022 tanggal Januari 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat TA. 2023;

2 KEPUTUSAN IRWADA POLDA SUMBAR
NOMOR : KEP/3/I/REN.2.3./2022
TANGGAL: 31 JANUARI 2022

2. Pagu Indikatif Itwasda Polda Sumbar T.A. 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN IRWASDA POLDA SUMATERA BARAT TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

1. Rancangan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Padang
pada tanggal:

Januari

2022

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR



ARIF RAHMAN HAKIM, S.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050542

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| I. LATAR BERLAKANG | |
| 1. Kondisi Umum | 1 |
| a. Perkembangan Aspek Kehidupan | 3 |
| b. Analisis | 14 |
| 2. Identifikasi Masalah | 14 |
| II. TUJUAN DAN SASARAN | |
| 3. Visi dan Misi | 15 |
| a. Visi Polda Sumbar dan Visi Itwasda Polda Sumbar..... | 15 |
| b. Misi Polda Sumbar dan Misi Itwasda Polda Sumbar..... | 15 |
| 4. Tujuan | 16 |
| a. Tujuan Polda Sumbar Tahun 2023 | 16 |
| b. Tujuan Itwasda Polda Sumbar Tahun 2023..... | 17 |
| 5. Sasaran Prioritas Tahun 2023..... | 17 |
| a. Sasaran Prioritas Polda Sumbar | 17 |
| b. Sasaran Prioritas Itwasda Polda Sumbar..... | 18 |
| III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI | |
| 6. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sumbar Tahun 2023 | 18 |
| 7. Arah Kebijakan dan Strategi Itwasda Polda Sumbar Tahun 2023 .. | 39 |
| IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2023 | |
| 8. Program kegiatan | 41 |
| 9. Pagu Indikatif | 42 |
| V. PENUTUP | |
| 10. Penutup | 43 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |
| 1. RKT | |
| 2. RKA-KL | |

**RANCANGAN RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari tahapan Rencana Strategis Itwasda Polda Sumbar 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Itwasda Polda Sumbar Tahun 2022 sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumbar Tahun 2023. Rancangan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumbar Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Itwasda Polda Sumbar 2020-2024, disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Polda Sumbar Tahun 2022.

Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal. Dalam melaksanakan tugas Itwasda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. Pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara:
 - 1) audit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (Garkeu);
 - 2) reviu;
 - 3) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL); dan
 - 4) evaluasi.

c. pemberian.....

- c. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;
- e. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; dan
- f. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Itwasda Polda Sumbar di dukung oleh Subbag dan Irbid. Tugas dan fungsi Subbag dan Irbid dapat kita lihat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Itwasda Polda Sumbar telah menunjukkan keberhasilan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan indikator, menurunnya pelanggaran atau kesalahan administrasi, terlaksananya Operasi Kepolisian di Jajaran Polda Sumbar berjalan sebagaimana aturan yang berlaku, menurunnya jumlah pengaduan masyarakat atas perilaku anggota Polri khususnya Polda Sumbar dilapangan, terlaksananya kegiatan verifikasi, terwujudnya laporan satuan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta mewujudkan pelayanan maksimal terhadap setiap pengaduan dari masyarakat.

Perkembangan lingkungan strategis harus dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa berubah disetiap daerah. Semua isu strategis baik global, nasional dan regional tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Ranrenja Itwasda Polda Sumbar T.A.2023.

Dalam perkembangan lingkungan masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan, baik darat maupun laut, pencemaran lingkungan, penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan TKA dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme.

Untuk

Untuk pencapaian keberhasilan kinerja Itwasda Polda Sumatera Barat tahun 2023, perlu adanya dukungan dan kepercayaan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai yang dikenal sebagai filosofi **“Tungku Tigo Sajaringan, Tali Tigo Sapilin”**, artinya Itwasda Polda Sumatera Barat harus membangun hubungan kerjasama dan bersinergitas dengan seluruh *stake holder* agar membantu Polda Sumbar dalam pencapaian terwujud keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Untuk mewujudkan kondisi tersebut di atas maka dijabarkan dalam program dan kegiatan serta anggaran yang mengacu kepada sasaran prioritas, arah kebijakan dan strategi Itwasda Polda Sumbar tahun 2023.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Itwasda Polda Sumatera Barat yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis yang akan digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

1). Geografi

- a) Propinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' Lintang Utara sampai 3°30' Lintang Selatan serta 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur dengan luas total wilayah sekitar 42.012,89 Km² atau luas tersebut setara dengan 2,17 % dari luas Republik Indonesia, propinsi Sumatera barat terletak disebelah barat pulau Sumatera.
- b) Provinsi Sumatera Barat memiliki luas total sekitar 42.297,30 Km² dan sebagian wilayah yang menghadap ke arah Samudera Indonesia yang pengelolaan pengamanannya relatif lemah karena sarana dan prasarana yang dimiliki relatif kecil sehingga mudah orang asing memasuki wilayah perairan Sumatera Barat dengan aman tanpa diketahui oleh petugas keamanan hal tersebut bila kedepan tidak ada penambahan sarana dan prasarana yang memadai dapat berpotensi terjadinya pencurian hasil laut oleh nelayan asing dengan menggunakan pukat harimau, sedangkan kondisi wilayah daratan Sumatera Barat sebagai poros yang menghubungkan beberapa provinsi tetangga seperti prov. Sumut, Prov.Riau, Prov jambi dan Prov Bengkulu. memudahkan para pelaku kejahatan di Sumbar untuk melarikan diri dan menyimpan barang bukti hasil kejahatan keluar daerah.

c) Sumatera.....

- c) Sumatera Barat merupakan daerah rentan terjadinya gempa bumi baik didarat maupun dilaut disebabkan karena wilayah sumbar terletak diatas lempeng eurasia dan lempeng australia yang mempunyai beberapa retakan antara lain : retakan/patahan disepanjang pulau sumatera (patahan semangka) mulai dari wilayah Aceh sampai ke Lampung dan adanya retakan/patahanMentawai Antara pulau Sumatera dengan Pulau Mentawai serta patahan sebelah barat pulau Mentawai (bagian barat kep. mentawai (antara batas lempeng eurasia dgn lempeng australia / zona subduksi sumatera) dimana lempeng australia bergerak mendorong lempeng eurasia dgn. kecepatan ± 7 cm / tahun ke arah timur laut serta adanya 2(dua) gunung yang masih aktif) Gunung Merapi dan gunung Talang yang sewaktu-waktu bisa terjadi gempa bumi/tsunami.
- d) Geografi Sumatera Barat meliputi bukit dan pegunungan ,dengan maraknya kasus illegal logging atau pembabatan hutan secara besar-besaran untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan oleh sebagian masyarakat di Sumatera Barat karena minimnya pengawasan, bila hal ini pemerintah daerah setempat tidak segera mengambil langkah – langkah nyata untuk mengatasi hal tesebut maka diperkirakan pada tahun 2020 mendatang cadangan huntan yang ada di Sumbar semakin menipis, bila hal ini terjadi berdampak sangat luas disamping hutan tidak mampu manahan resapan air hujan sehingga dapat menimbulkan bencana alam banjir, tanah longsor, dampak lain adalah tidak teraturnya suhu/ iklim di Sumbar sendiri yang dapat mempengaruhi cuaca yang tidak teratur dan susah diprediksi.
- e) Propinsi Sumbar memiliki 2 (dua) musim kemarau dan musim hujan, yang berpotensi menimbulkan ancaman banjir, tanah longsor, bencana kekeringan atau kebakaran hutan, sehingga perlunya antisipasi terhadap permasalahan musim tersebut karena hal tersebut pasti akan terjadi untuk meminimalisir terjadinya kerugian harta benda maupun jiwa.

2). **Demografi**

- a) Jumlah penduduk Sumbar Propvinsi Sumbar tahun 2020 mencapai 5.441.197 jiwa terdiri laki-laki sebanyak 2.711.772 orang dan penduduk perempuan sebanyak 2.729.425 orang diperkirakan pada tahun 2021 bila pemerintah tidak melakukan langkah-langkah penanggulangan maka jumlah penduduk di Sumbar bisa mencapai 5.606.781 jiwa, dengan penyebaran penduduk yang tidak merata dapat menyebabkan didaerah-daerah tertentu terjadi kepadatan penduduk serta tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup manusia lainnya, merupakan potensi terhadap terjadinya berbagai masalah sosial dan keamanan dengan demensi yang sangat kompleks.
- b) Komposisi penduduk Provinsi Sumatera Barat yang mayoritas beragama Islam, keadaan tersebut akan berpengaruh terhadap pola pikir dan landasan moral serta sepiritual masyarakat. Walaupun keberadaan agama lainnya yang berada di wilayah sumbar tetap memperoleh tempat untuk berkembang, Sikap solidaritas dan kerukunan hidup antar umat beragama masih tetap terpelihara, hal ini menjadi salah satu potensi yang menguntungkan bagi pembangunan di Provinsi Sumatera Barat yang tetap dipertahankan, namun apabila pemerintah kurang mempertimbangkan kepentingan adanya perbedaan tersebut cenderung akan menimbulkan kerawanan berupa terjadinya konflik yang berlatar belakang perbedaan tersebut antara lain terjadinya konflik horizontal atau vertikal.

3) **Sumber Daya Alam**

- a) Kondisi Sumber daya alam di Sumatera Barat belum bisa dikelola secara optimal karena terbatasnya sumber daya manusia yang handal/profesional yang seharusnya bisa dikelola dengan optimal dalam rangka sebagai pemasukan devisa negara ataupun peningkatan ekonomi rakyat Sumbar itu sendiri sehingga apabila hal tersebut tidak dikelola dan diamankan dengan baik maka dapat berpotensi menjadi gangguan nyata seperti :
 - Pencurian kayu hutan lindung.
 - Pengrusakan lingkungan.
 - Pencurian Ikan oleh kapal asing.
 - Pencurian terumbu karang.
 - Penyerobotan pulau kecil oleh Negara Asing.
 - Sabotase kebakaran hutan.
 - Banjir dan tanah longsor.

b) Tumpang.....

- b) Tumpang tindihnya kewenangan pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah masih menjadi permasalahan yang mengarah terjadinya konflik sosial dilapangan, sehingga hal tersebut sering dijadikan celah /titik kelemahan oleh sekelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan secara illegal untuk keperluan dan kepentingan individu maupun kelompoknya sendiri.

4) Ideologi.

- a) Berkembangnya berbagai aliran kepercayaan di beberapa daerah di Indonesia yang terindikasi menginginkan adanya perubahan ideologi Pancasila menjadi syariah Islam, hal tersebut sangat bertentangan dengan isi dari sila-sila Pancasila sebagai satu-satunya azas bernegara di Indonesia, Kelompok islam ini akan terus berupaya menyebarkan pengaruhnya termasuk ke wilayah Sumbar sehingga rentan terjadinya konflik horizontal.
- b) Sebagai dampak reformasi saat ini dimana masyarakat merasa mendapat suatu kebebasan dalam berdemokrasi khususnya dalam membentuk suatu organisasi tertentu sesuai dengan keinginan pribadi maupun kelompoknya masing-masing sehingga mengandung potensi kerawanan masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya konflik horizontal maupun vertikal. ataupun kelompok lain yang ingin menghidupkan kembali faham komunisme seperti Yayasan Penellitian Korban Peristiwa 1965/1966 (YPKP) yang telah muncul di wilayah Sumatera Barat sejak tahun 2012 dan kegiatannya di wilayah Sumatera Barat mendapat protes dan ditentang masyarakat setempat.

5) Politik

- a) Sistem Politik dalam negeri menganut sistem demokrasi sesuai nilai –nilai Pancasila ,yang mengedepankan azas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun masih adanya indikasi kelompok tertentu untuk tetap melanjutkan amandemen UUD 1945 antara lain :
 1. Kelompok yang ingin kembali ke UUD 1945.
 2. Kelompok yang menginginkan perubahan /amandemen secara berlanjut.
 3. Kelompok yang menginginkan dikaji ulang hasil amandemen UUD 1945.

b) Otonomi.....

- b) Otonomi khusus berdampak positif terhadap peningkatan APBD yang cukup signifikan , namun manfaat otonomi khusus belum dapat dirasakan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
- c) Pemekaran wilayah menimbulkan berbagai permasalahan karena prosesnya terkesan dipaksakan oleh sekelompok orang/tokoh di daerah tersebut dengan berusaha mencari dukungan berbagai pihak ,baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat dan kerap mengabaikan pentahapan serta mengabaikan persyaratan prinsip-prinsip daerah otonomi seperti batas wilayah partisipasi rakyat dan sumber daya yang dimiliki.
- d) Dampak lain dari pemekaran wilayah antara lain terjadinya permasalahan seperti perebutan Batas wilayah kota Bukittinggi dengan Kab. Agam yang sampai saat ini masih belum memiliki kejelasan wilayah administratif akibat di keluarkannya PP 84 tahun 1999 yang menetapkan 3 kecamatan Kab. Agam (Kec. Tilkam, Kec. Biaro dan Kec. Banuhampu) masuk ke wilayah Kota Bukittinggi.sedangkan Tokoh masyarakat dan masyarakat dari ketiga kecamatan menolak penyatuan 3 kecamatan yang dapat berdampak pada menurunnya pendapatan daerah masyarakat yang kemudian memberikan usulan agar 4 kecamatan. Kab. Agam lainnya (Kec. Baso, Kec. IV Koto, Kec. Palupuh dan Kec. Sungai Puar) untuk ikut dimasukkan dalam wilayah Kota Bukittinggi namun pengusulan tidak mendapat realisasi dari Pemerintah Pusat sehingga timbul keinginan masyarakat 7 kecamatan Kab. Agam Timur untuk membentuk Kab. Agam Tuo dengan cara memisahkan diri dari wilayah Kab. Agam Barat disamping itu juga terjadi pro kontra antara masyarakat Agam Timur dengan masyarakat Agam Barat dan tidak masuk wilayah Kota Bukittinggi. Kab. Agam terbagi dari wilayah Agam Barat dan Agam Timur. Agam Timur terdiri dari 10 (Sepuluh) Kecamatan dan 68 (enam puluh delapan) Nagari,rencana pembentukan Kabupaten baru di Agam Timur yang telah didukung oleh DPRD Agam dari tahun 2007 karena Agam Timur terlalu jauh dari pusat pemerintahan Kab. Agam. Wacana tersebut sampai saat ini tidak kunjung selesai sehingga masih menyisakan permasalahan setiap tahunnya dan berpotensi terjadinya konflik sosial dimasyarakat
- e) Jumlah Nagari di Wilayah Sumbar tercatat pada tahun 2019 sebanyak 1.228 nagari diperkirakan di tahun 2021 nantinya jumlah nagari di Sumbar bisa mencapai 1,500 lebih nagari yang kesemuannya merupakan Pemerintah terendah dibawah

Kecamatan.....

Kecamatan , namun hampir kesemua nagari yang ada di Sumbar belum mempunyai batas wilayah secara hukum positif melainkan batas wilayah hanya ditentukan menurut hukum adat setempat sehingga hal ini akan menambah kerawanan gangguan kamtibmas dimasa yang akan datang.

- f) Kondisi suprastruktur politik saat ini yang memiliki lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyelenggaraan negara berpotensi terjadinya korupsi yang melibatkan aparatur negara dan pejabat pemerintah.
- g) Netralitas birokrasi masih semu sebagai akibat adanya aturan bahwa partai politik berhak menetapkan calon pimpinan pemerintah baik pusat maupun daerah.
- h) Pelayanan publik yang dianggap belum baik sebagai akibat sikap mental yang masih berorientasi kepada kepentingan pribadi , tanggung jawab badan/lembaga masih tumpang tindih serta birokrat belum mendapat imbalan yang memadai sesuai yang diharapkan sehingga sering terjadinya penyalahgunaan kewenangan korupsi ataupun manipulasi di beberapa instansi pemerintah maupun swasta.
- i) Budaya Politik dalam sistem Politik Nasional yang aktualisasinya masih belum mencerminkan kehidupan budaya politik yang berdasarkan Pancasila ,dimana budaya politik yang berkembang lebih cenderung terjadinya budaya transaksional politik dikalangan partai politik dan elite politik dalam memperjuangkan tujuan politiknya.
- j) Menurunnya persatuan dan kesatuan bangsa yang dipengaruhi oleh primordial kedaerahan berpotensi terhadap menurunnya Nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang sempit dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga rentan terjadinya disintegrasi bangsa.
- k) Penegakan hukum masih akan dihadapkan pada integritas ,moralitas dan profesionalisme penegak hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang transparan, akuntabel dan berkeadilan kurang dirasakan oleh masyarakat kecil hal tersebut terbukti masih sering terjadinya aparat penegak hukum yang tertangkap melakukan jual beli kasus atau terlibat kasus-kasus tertentu yang dapat menciderai rakyat.

6) **Ekonomi**

- a) Krisis Global yang melanda seluruh Bangsa baik Negara maju maupun Negara berkembang juga dirasakan oleh Negara Indonesia dan Sumbar pada khususnya diperkirakan pada tahun 2023 masih akan mempengaruhi kinerja perekonomian nasional maupun daerah , arus investasi masih akan menghadapi berbagai permasalahan perkembangan industri dalam negeri sehingga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi baik secara nasional maupun lokal.
- b) Fluktuasi harga minyak mentah dunia yang tidak stabil serta makin menipisnya cadangan minyak dalam negeri diperkirakan akan mempengaruhi situasi dan kondisi nasional maupun daerah pada tahun 2023 mendatang dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan harga barang kebutuhan pokok serta naiknya ongkos transportasi yang dinilai memberatkan masyarakat kalangan kelas menengah kebawah.
- c) Meningkatnya kebutuhan konsumsi listrik untuk industri dan rumah tangga yang tidak diimbangi dengan penambahan produksi listrik (PLTA) sesuai kebutuhan serta terjadinya musim kemarau panjang mengakibatkan berkurangnya suplai listrik kepada konsumen sehingga terjadinya pemutusan arus secara bergiliran.
- d) Kebijakan di bidang transportasi dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di semua jenis serta adanya program pemerintah tentang mobil murah yang tidak diimbangi dengan infrastruktur jalan yang mendukung sehingga berdampak terhadap timbulnya berbagai permasalahan di bidang transportasi seperti kemacetan , keseremawutan jalan, naiknya angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas.
- e) Pengelolaan fungsi hutan yang tidak disertai dengan upaya pelestariannya menjadi potensi kerugian negara serta munculnya berbagai permasalahan seperti kerusakan lingkungan hidup merupakan faktor utama terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor.
- f) Masalah ketenagakerjaan masih dihadapkan sempitnya lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja yang tersedia yang disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia pekerja yang tidak memenuhi standarisasi lapangan kerja yang tersedia sehingga jumlah pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat dan berpotensi timbulnya gangguan kamtibmas.
- g) kebijakan.....

- g) Kebijakan Otonomi Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam masih dihadapkan pada kewenangan pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
- h) Permasalahan dibidang pertanian di sumbar masih dhadapkan kepada masalah iklim yang ekstrim dan kebijakan masalah publik serta masalah sengketa lahan pertanian serta lemahnya pengawasan khususnya batas teritorial kelautan dan perikanan ,peningkatan kesejahteraan nelayan serta masih lemahnya penegakan hukum menjadi potensi meningkatnya gangguan kamtibmas baik bersumber dibidang pertanian maupun sumber kekayaan laut dan habitatnya sehingga kekayaan laut sering di curi oleh kapal – kapal asing.

7) Sosial Budaya

- a) Masyarakat Minangkabau yang hidup di lingkungan adat dan budaya yang khas memiliki falsafah hidup adat yang berdasarkan “Adat Basandi sara’ dan sara’ basandi Kitabullah”. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi juga telah ikut menerpa masyarakat Sumatera Barat yang berakibat terjadinya perubahan-perubahan sosial atau terjadi pergeseran status sosial ditengah-tengah masyarakat yg dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi timbulnya gangguan kantibmas atau kriminalitas.
- b) Keragaman etnis agama, suku dan ras selain merupakan aset negara bila hal tersebut tidak dikelola secara baik dapat merupakan potensi bagi terjadinya konflik yang berlatar belakang perbedaan yang ada.
- c) Keberhasilan pengungkapan terorisme oleh Desus 88 telah mendapat apresiasi dari negara-negara di dunia karena di Indonesia telah benar-benar serius menangani masalah terorisme , namun karena jaringan terorisme di Indonesia telah mengakar sampai ke tingkat masyarakat paling bawah sehingga diperkirakan beberapa tahun kedepan ancaman terorisme di Indonesia masih tetap tinggi dan perlu kewaspadaan aparat keamanan.
- d) Penebangan liar di hutan terutama dilokasi serapan air ,dapat berakibat kepada timbulnya tanah longsor/banjir bandang pada waktu musim hujan yang dapat menimbulkan korban harta benda dan jiwa, serta rusaknya ekosistem disekitar lokasi hutan.

e) Pembukaan.....

- e) Pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar lahan pada musim kemarau, dapat mengakibatkan timbulnya kabut asap yang pekat , sehingga mengganggu kesehatan dan transportasi perhubungan baik darat,laut dan udara serta mendapatkan konplain dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darusalam.
- f) Sengketa pertanahan/agraria yang dilatarbelakangi oleh status kepemilikan tanah baik secara perorangan maupun kelompok yang tanpa disertai oleh dokumen kepemilikan atau penerbitan surat tanah/sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional setempat,atau pemerintah daerah setempat menimbulkan sengketa yang berdampak terjadi konflik horisontal maupun vertical.

8) Keamanan.

Permasalahan di bidang keamanan yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan tahun 2022 meliputi:

- a) Tingkat kesadaran kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah, sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa dan adanya kecenderungan dalam menangani masalah keamanan dimana masyarakat bertindak main hakim sendiri.
- b) Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa masalah keamanan merupakan tugas aparat keamanan sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun sistem keamanan dilingkungan masyarakat.
- c) Kurangnya peran pranata sosial dalam membangun keamanan disertai anggapan bahwa masalah keamanan segalanya bisa diatur dan ditentukan adat setempat, serta tingkat pemahaman tentang keamanan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih relatif rendah sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal.
- d) Belum optimalnya penegakan hukum yang berkeadilan sehingga mempengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.
- e) Berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat baik yang bersumber dari kondisi sosial politik , sosial ekonomi maupun sosial budaya yang berdampak pada masalah keamanan.

Kerawanan.....

Kerawanan daerah yang perlu mendapat perhatian.

Kerawanan daerah berdasarkan analisis jenis kejahatan yang terjadi di beberapa wilayah Kab/Kota di Sumbar dan menjadi prioritas untuk mendapat perhatian antara lain :

- a) Polresta Padang kerawanannya adalah : Curat, Curas, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Perkosaan, Pengrusakan, Penipuan, Pembakaran/kebakaran, Narkoba, judi, tetorisme, Korupsi, Unjuk Rasa, dan Perkelahian antar Pelajar, banjir/tanah longsor , gempa bumi / tsunami ,pelanggaran OA dan Laka Lantas.
- b) Polres Padang Pariaman kerawanannya adalah : pekerjaan pembuatan jalan Tol Padang – Sicincin KM 0 s/d 36 dilaksanakan dan direncanakan selesai antara tahun 2018 s/d 2020, dalam pembuatan jalan tol tersebut mempunyai kerawanan diantaranya jalan tol tersebut melewati kawasan industri Padang pariaman.
- c) Polres Pessel Kerawanannya adalah : lilegal Fishing atau pencurian ikan, Curat, Curas, Curanmor, Anirat, Pengrusakan, penipuan,pembakaran, judi, narkoba, Illegal logging, penyelundupan, gempa bumi dan tsunami.
- d) Polres Bukittinggi kerawanannya adalah : Curat, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Perkosaan, Pengrusakan, Penipuan, penganiayaan, Narkoba, Unjuk Rasa, Laka Lantas, Korupsi dan gempa bumi , Serta masalah Potensi Konfilk.
- e) Polres Payakumbuh kerawanannya : Curas, Curat, Curanmor, Narkoba, Perjudian, Unjuk rasa,.penyelundupanm, OA,dan laka lantas serta kegiatan pertambangan Andesit.
- f) Polres Pasaman Barat kerawanannya adalah : Curat, curas,Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Pengrusakan, Pembakaran / kebakaran, Narkoba, judi,perkelahian Antar Nagari, Illegal Loging, Laka Lantas. Gempa bumi/tsunami dan permasalahan Kperebutan lahan maupun hasil lahan perkebunan Sawit.
- g) Polres Solok kerawanannya adalah : Curat, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Pengrusakan, Pembakaran / kebakaran, Narkoba, Rusuh massal / antar nagari, illegal loging ,iligal Mining Unjuk Rasa dan Laka Lantas.
- h) Polres Dharmasraya kerawanannya adalah : curat,curas,curanmor,penipuan, penganiayaan, kebakaran / pembakaran, Illegal loging, illegal mining,perkelaian antara kampung, perkelahian antar suku, senpi / handak, Rusuh Massal, Narkoba dan laka lantas serta Konflik lahan perkebunan.
- i) Polres

- i) Polres Solok Kota kerawanannya : Curas, Curat, Curanmor, Unjuk rasa, kebakaran, perkosaan /pencabulan, kebakaran/pembakaran perkelahian antar kampung,narkoba ,gempa bumi laka lantas.
- j) Polres Pariaman Kota kerawanannya adalah :Curat, curas, curanmor, pengrusakan, penipuan, kebakaran, perjudian, narkoba korupsi, pencurian ikan, gempa/tsunami dan laka lantas.
- k) Polres 50 Kota kerawanannya adalah : Curat, Curas, Curanmor, Anirat, illegal logging, Perkosaan, Penipuan, Narkoba, Unjuk Rasa, Laka Lantas dan Korupsi serta kegiatan pertambangan Andesit.
- l) Polres Solok Selatan kerawanannya : Illegal logging, Curas, Curat, Curanmor, pengrusakan, penipuan, perkelahian, kebakaran/pembakaran, senpi/handak, illegal logging, illegal minning, Rusuh massal, laka lantas dan konflik lahan Perkebunan.
- m) Polres Tanah Datar kerawanannya adalah : Curat, curas, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Narkoba, Unjuk Rasa, Rusuh Masal / antar nagari, Laka Lantas, dan Korupsi, gempa bumi.
- n) Polres Padang Panjang kerawanannya adalah : Curat, curas,curanmor, anirat, Kebakaran/pembakaran, Narkoba, perkelahian, gempa bumi, lakalantas dan konflik perbatasan Nagari.
- o) Polres Agam kerawanannya adalah : Curat, Curas, Pembunuhan, Perkosaan, Narkoba, Unjuk Rasa, Rusuh Massa/antar nagari, tanah longsor / bencana alam, Laka Lantas dan konflik lahan perkebunan.
- p) Polres Pasaman kerawanannya adalah : Curat, Curas, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Pengrusakan, Pembakaran / kebakaran, Narkoba, judi, perkelahian Antar Nagari, Illegal Logging, ilegal Mining, Laka Lantas konflik lahan perkebunan.
- q) Polres Sawahlunto kerawanannya adalah : Curat, Curanmor, Anirat, Pengrusakan, Pembakaran, Narkoba, Unjuk Rasa, Illegal Logging, Peti, dan Laka Lantas, Konflik Sara.
- r) Polres Sijunjung kerawanannya ; Illegal Logging, Illegal minning , curat, Curas, curanmor, Kebakaran, Narkoba, Unjuk Rasa, Rusuh Missal (Sara) dan laka lantas.
- s) Polres Mentawai kerawanannya adalah : kasus Illegal Logging, Ilegal Fishing, penyelundupan, pencurianikan, perkelahian, terorisme, pelanggaran Orang Asing serta Laka Laut.

b. Analisis

Pelaksanaan tugas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal, sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi. Penilaian AKIP Itwasda Polda Sumbar tahun 2021 oleh APIP Polda Sumbar mendapat kategori B (72,48). Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan waktu sebagai dampak akibat pengaruh dari penyebaran *Covid-19*, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber). Masih dijumpai adanya kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum. Tren peningkatan kejahatan, Curat, Curas, Curanmor, Penipuan, Narkoba dan Kriminal lainnya yang menuntut Polri untuk lebih optimal dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum.

2. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tugas Itwasda Polda Sumbar seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, nasional dan regional akan semakin berat dan kompleks. Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja dan pelayanan di bidang kepolisian semakin tinggi, mengharuskan menyusun berbagai upaya dan aksi konkrit yang efektif dalam membantu mewujudkan Kaamanan di Provinsi Sumatera Barat. Secara umum permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi Polda Sumatera Barat pada Tahun 2023 dan khususnya pada satker Itwasda Polda Sumbar adalah sebagai berikut:

- a. Dampak ekonomi dari akibat adanya penyebaran *Covid-19* yang turut mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menuntut Itwasda sebagai APIP lebih meningkatkan Audit Kinerja terhadap kegiatan penyidikan dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Personel yang dimutasikan ke jajaran Itwasda Polda Sumbar sebagai Parik/Auditor belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang auditing;

c. Masih.....

- c. Masih adanya beberapa pengawasan melekat para Kasatwil kepada satuan bawah dirasakan lemah sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran disiplin anggota serta penyimpangan pelaksanaan tugas;
- d. Basih adanya belum kesesuaian realisasi/penyerapan anggaran dengan perencanaan anggaran masing-masing satker dalam program dan kegiatan dapat berdampak pada pencapaian target kinerja dengan output kegiatan yang berkualitas menjadi belum optimal;
- e. Perencanaan kinerja yang sering mengalami perubahan menyulitkan satker dalam mempedomani penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- f. Adanya penugasan yang bersifat tumpang tindih antara tugas yang telah dijadwalkan secara rutin dengan penugasan yang sifatnya kontijensi/darurat.

II. Tujuan dan Sasaran

3. Visi dan Misi

- a. Visi Polda Sumatera Barat dan Visi Itwasda Polda Sumbar
 - 1) Visi Polda Sumatera Barat
“Terwujudnya Sumatera Barat yang aman dan tertib”.
 - 2) Visi Itwasda Polda Sumatera Barat
“**Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan, Audit, Reviu dan Klarifikasi secara professional**”
- b. Misi Polda Sumatera Barat dan misi Itwasda Polda Sumatera Barat
 - 1) Misi Polda Sumatera Barat
sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun dalam misi sebagai berikut :
 - a) **Melindungi** keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat Sumatera Barat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia;
 - b) **Melayani** kepentingan masyarakat di Sumatera Barat, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
 - c) Mengayomi

- c) **Mengayomi** dengan selalu berusaha memberikan contoh yang terbaik pada masyarakat Sumatera Barat, agar masyarakat Sumatera Barat bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik.

2) Misi Itwasda Polda Sumatera Barat

sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun dalam misi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan peningkatan kemampuan APIP yang berkualitas dan professional dengan mengikuti diklat secara bertahap dan berkesinambungan;
- b) Melaksanakan kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;
- c) Melaksanakan kegiatan Verifikasi terhadap adanya mutasi kepala satuan kerja ketempat yang baru sehingga pelaksanaan kinerja pejabat yang lama dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Melaksanakan reviu atas laporan keuangan, reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), evaluasi AKIP, evaluasi Penilaian Mandiri Penyusunan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan evaluasi Zona Integritas (ZI) diharapkan menghasilkan laporan yang berkualitas;
- e) Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan, klarifikasi, konfirmasi, pemeriksaan dan penelitian setiap pengaduan.

4. Tujuan jangka menengah

a. Tujuan Polda Sumatera Barat

- 1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sumatera Barat;
- 2) Menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) Mewujudkan Polri Polda Sumbar yang Profesional;
- 4) Modernisasi pelayanan Polri Polda Sumbar;
- 5) Menerapkan manajemen Polri Polda Sumbar yang terintegrasi.

b. Tujuan

b. Tujuan Itwasda Polda Sumatera Barat

1. Meningkatkan kemampuan APIP yang berkualitas dan professional;
2. Terlaksananya kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu sehingga dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi, dan efektifitas pencapaian tugas dan fungsi Polda Sumbar;
3. Terselenggaranya kegiatan serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru secara transparan dan akuntabel;
4. Terselenggaranya kegiatan reviu dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan sehingga menghasilkan laporan satker yang berkualitas;
5. Terselenggaranya pelayanan dumas dan terselesainya dumas secara baik, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat.

5. Sasaran Prioritas Tahun 2023

a. Sasaran prioritas Polda Sumatera Barat tahun 2023

- 1) Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat;
- 2) Mengoptimalkan kualitas Pelayanan Publik Polri;
- 3) Penegakan Hukum yang Transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan Publik;
- 4) Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri;
- 5) Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang modern;
- 6) Penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan Tatakelola Organisasi yang baik

b. Sasaran

- b. Sasaran prioritas Itwasda Polda Sumatera Barat tahun 2023
 - a. Menjadikan personel APIP yang berkualitas dan professional;
 - b. Seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar menjadi taat, hemat, efisien, dan efektif dalam pencapaian tugas dan fungsi;
 - c. Setiap Kasatker dan Kasatwil yang akan melaksanakan serah terima jabatan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pada bidang opsnal, SDM, sarpras, dan keuangan;
 - d. Seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar yang direviu dan evaluasi sehingga laporan dapat diyakini;
 - e. Setiap pengaduan masyarakat yang dilaporkan baik langsung maupun tidak langsung dapat ditindak lanjuti.

III. Arah kebijakan dan strategi Tahun 2023

6. Arah kebijakan dan strategi Polda Sumbar Tahun 2023

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Sumbar Tahun 2023, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Prioritas **“Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat”** yaitu:

- 1) penguatan peran Polri dalam menjaga keamanan nasional melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, tahapan Pemilu 2024 di tahun 2022 dan gangguan Kamtibmas lainnya; (giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog BQ/SP1/SS1/IKU1/ PPK/ prog 5, 10, giat16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);

b) melakukan.....

- b) melakukan Lidikpangal dengan fokus pada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
(giat 3112,3114,3115,3116,3117,3150/prog BQ/SP1/SS1/IKU1/PPK/prog5, 10, giat16, 33, 34, renaksi 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130,131);
 - c) mengembangkan manajemen operasi intelkam Polda Sumbar;
(giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog BQ/SP1/SS1/IKU1/ PPK/prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);
 - d) melaksanakan penelitian dan survei dalam rangka mendukung Indeks Kamtibmas di lingkungan Polri. (giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 4, giat 11, renaksi 41, 42, 43);
- 2) meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibas satu desa/kelurahan/nagari;
(giat5076/prog BQ/SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, 14, renaksi 51, 55);
 - b) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada kelompok kontra radikal dan deradikalisasi; (giat5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 65);
 - c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerja sama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang memiliki paham radikal;
(giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, 15, renaksi 46, 47, 56, 57, 59);
 - d) menetralsir.....

- d) menetralsir dan menekan isu berita negatif yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas serta membentuk jaringan media informasi;
(giat 3149, 3070/prog WA /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 13, giat 43, renaksi 151, 152, 155, 156, 159, 160, 161);
 - e) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan; (giat 3155/prog WA /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, 13, 16, renaksi 44, 46, 47, 52, 53, 60, 61, 65, 66);
 - f) meningkatkan kegiatan Patroli wilayah rawan kriminalitas;
(giat 3130/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46);
 - g) meningkatkan pelacakan dan penangkalan di tempat keramaian, rawan kejahatan dan daerah perbatasan;
(giat 5081/ prog BQ/SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48);
 - h) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/ Obvitnas dan tempat pariwisata; (giat 3131/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 50);
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan *pemolisian prediktif* serta dukungan Polri dalam penanganan *Covid-19*;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan pemberdayaan pengembalian kewenangan kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam;
(Giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 21, renaksi 79, 80);
 - b) peningkatan pemberdayaan pengembalian kewenangan kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus; (giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 21, renaksi 79, 80);

c) pembinaan

- c) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dan asistensi penguatan KBPPP;
(giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46, 47);
- d) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas; (giat 3133,4343/prog BQ,BI/SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, 6, giat 12, 23, renaksi 49, 91);
- 4) penanganan konflik secara humanis;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemberian penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/Komunitas guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial; (giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 60, 64, 65, 68);
- b) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis; (giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55, 67);
- 5) meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat saat jam rawan serta berperan aktif dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli Lantas;
(giat 3133/ prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 49);
- b) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;
(giat 3130/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27 ,28, renaksi 49, 107, 112);

c) Meningkatkan

- c) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan dalam rangka mendukung PEN serta peran aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
(giat 3131/prog BQ/SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 49, 50, 107);
- 6) meningkatkan peran aktif Polri di wilayah rawan gempa dan bencana;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan stakeholders dalam penanggulangan bencana keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan serta wabah; (giat 5087/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);
- b) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan satwa; (giat 3130,5081/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);
- c) memetakan masyarakat desa/wilayah rawan gempa dan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana; (giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 9, giat 30, renaksi 123);
- d) bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan pelayanan kesehatan pada daerah rawan pandemi, gempa dan bencana; (giat 3072, 5076/prog BQ, WA /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 32, renaksi 31);
- 7) terlaksananya pengamanan event nasional/ internasional tahun 2022;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) penanggulangan

- a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sesuai dengan tindakan kepolisian yang berlaku serta mengoptimalkan kekuatan Brimob Polri yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat saat event nasional/ internasional berlangsung; (giat 5080,5087/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 73);
 - b) melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat pada event nasional/internasional tahun 2022; (giat 3130, 3131/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70, 71, 73, 126);
 - c) melaksanakan kegiatan pengamanan tahapan pemilu 2024 ditahun 2022; (giat 3130,3131/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, 28,renaksi 49, 70, 107, 112);
- 8) penggelaran kekuatan operasional Kepolisian di kewilayahan dalam rangka pengamanan unjuk rasa; penanganan konflik sosial; dan menjalin sinergitas polisonal serta menangani gangguan kelompok kriminal bersenjata;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan dan mengoordinasikan kontinjensi dengan menggelar pasukan terhadap wilayah-wilayah yang rawan konflik, bencana dan ancaman terorisme;
(giat 5080, 5087/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog10, giat 17, renaksi 66, 128, 132);
- b) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi; (giat 5087/prog BQ/SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 17, renaksi 69);
- c) membangun sinergisitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif;

giat.....

- (giat 5076, 5087/ prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);
- d) melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat; (giat 3130/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78, 101, 103);
- e) tergelarnya personel di kawasan Obvitnas dan objek tertentu; (giat 3131 /prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 50, 107, 114, 119, 121, 122, 124, 125);
- f) melaksanakan kegiatan pelayanan pelacakan dan penangkalan; (giat 5081/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, 30, renaksi 50, 120);
- g) memperkuat Binmas Nokendengan melibatkan peran Bhabinkamtibmas; (giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55);
- 9) peningkatan kerja sama dalam negeri;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- melaksanakan kerja sama antara Polri dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi polisional; (giat 3120/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 20, renaksi 78, 104, 105, 110, 111, 147, 148, 158);
- 10) penggelaran patroli kapal Polri di wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- patroli kapal Polri di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;
- (giat 3134, 4342/ prog BQ, BI /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48)
- 11) penggelaran.....

- 11) penggelaran patroli kapal Polri di wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- patroli kapal Polri di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;
- (giat 3134, 4342/ prog BQ, BI /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48);
- 12) penguatan Polri dibidang keamanan di pulau berpenghuni;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) membangun kemampuan operasional Brimob Polri dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi di pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan patroli (pre-emptif, preventif dan penegakan hukum) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN, baik darat maupun laut; (giat 3130, 5087, 3134/ prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, 10, giat 12, 10, renaksi 48, 50, 133);
 - b) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas, Obvit/ Obvitnas dalam rangka penguatan Polri di bidang keamanan pulau berpenghuni; (giat 3130, 3131,/ prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48, 50);
 - c) meningkatkan pelacakan dan penangkalan di tempat keramaian dan rawan kejahatan dalam rangka penguatan Polri di bidang keamanan perbatasan dan pulau berpenghuni; (giat 5081/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46);

b) Arah.....

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik Polri”, yaitu:

- 1) modernisasi fasilitas sarana dan prasana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) peningkatan pelayanan Online yang terintegrasi serta pelayanan keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;
(giat 3133, 3084/prog BP, BQ, prog2/SP2/SS2/IKU2/PPKprog 4, 11, giat 9, 10,37,40, renaksi 33,37,8,135,141,142,144);
- b) meningkatkan pengembangan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;
(giat 3133, 3084/prog BP, BQ,prog2/SP2/SS1/IKU1/PPK prog 4, 11, giat 9, 10, 37, 40, renaksi 33, 37, 38, 135, 141, 142, 144);
- c) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi; (giat 3133/prog BQ /SP2/SS4/IKP4/PPK prog 11, giat 37, 38, renaksi 135, 136, 137, 139, 143);

- 2) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan meniadakan pungutan liar di pelayanan publik, serta menumbuhkan sikap petugas yang melayani;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melakukan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan SKCK online;
(giat 3073/prog WA /SP2/SS4/IKP4/PPK prog 11, giat 40, renaksi 141, 144);

b) melakukan

- b) melakukan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajaran; (giat 3072/prog WA /SP2/SS5/IKP12/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
 - c) mengoptimalkan operator (out sourcing) untuk helpdesk support aplikasi Binmas Online System (BOS); (giat 5076/prog BQ/SP2/SS4/IKP4/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55);
 - d) meningkatkan optimalisasi sistem dan inovasi pelayanan intelkam Polda Sumbar melalui layanan drivethru perpanjangan SKCK dan layanan SKCK delivery di Polda Sumbar dan jajaran Polres; (giat 3084/prog BP /SP2/SS4/IKP4/PPK prog 11, giat 40, renaksi 141, 144);
- 3) keterpaduan dalam pengelolaan ruang SPKT dan melanjutkan tatakelola RPK yang humanis serta berbasis TIK;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online; (giat 5062/ prog BP /SP2/SS4/IKP4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 39, 40);
- 4) mengoptimalkan quick response Kepolisian sesuai standar Operasional Prosedur (SOP):
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) engoptimalkan bantuan teknis khusus Satwa dalam pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban; (giat 5081/prog BQ/SP2/SS1/IKU1/PPK prog 9, giat 32, renaksi 123);
 - b) meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu melalui pembinaan teknis (supervisi, asistensi, verifikasi) dan audit; (giat 3131/prog BQ/SP2/SS1/IKU1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 50, 107);
 - c) mengelola

- c) mengelola kegiatan respons time di Wilkum Polda Sumbar dan kewilayahan; (giat 3130/prog BQ/SP2/SS1/IKU1/PPK prog 5, 9, giat 12, 30, renaksi 48, 117);
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penegakan Hukum yang Transparan Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik”**, yaitu:
- 1) meningkatkan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat:
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Sumatera Barat;
(giat 4342/prog BI /SP3/SS2/IKU2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 84);
- b) meningkatkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana Korupsi (pencegahan dan asset recovery), Narkoba (TPPU), Karhutla/LH serta Siber termasuk kejahatan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
(giat 3140, 3142, 3144, 3145, 3146, 5083, prog BI /SP3/SS2/IKU2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 85, 86, 87, 88, 94,95, 98, 106);
- c) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di bidang pangan, pertanian, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan);
(giat 3145/prog BI/SP3/SS2/IKU2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 86, 109);
- d) melaksanakan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan; (giat 3142/prog BI /SP3/SS2/IKU2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 84);
- e) penanganan kejahatan pada ruang siber (cyber crime) yang mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat; (giat 3151/prog BI /SP3/SS2/IKU2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 88);
- f) meningkatkan.....

- f) meningkatkan penindakan hukum terbatas/Tipiring; (giat 3130/prog BQ/SP3/SS2/IKU2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 92, 93, 102);
 - g) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional; (giat 5086/prog BI /SP3/SS2/IKU2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 89, 90, 108);
- 2) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum guna memenuhi rasa keadilan masyarakat:

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) memberikan SP2HP2 kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka; (giat 3137/ prog BI /SP3/SS2/IKU2/PPK prog 16, giat 51, renaksi 176, 177);
- b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran Birowassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (giat 5086/prog BI /SP3/SS2/IKU2/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162, 163);
- c) mengoptimalkan Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) sebagai sarana pengawasan dan transparansi; (giat 5086/prog BI /SP3/SS2/IKU2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 97);

d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ***“Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri”***, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa Beban Kinerja (ABK), SIK3 dan pengembangan struktur organisasi polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Mengoptimalkan.....

- a) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) di setiap Satker; (giat 5052/prog WA /SP4/SS3/IKP2/PPK prog 2, giat 3, renaksi 6, 7);
 - b) pengembangan struktur organisasi Polri pada tingkat Satuan Kewilayahan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3; (giat 5052/prog WA/SP4/SS3/IKP2/PPK prog 1, giat 1, 2, renaksi 2, 3, 4);
 - c) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) di setiap Satker guna pengembangan organisasi Polri dengan melakukan kajian kelembagaan, baik bidang pembinaan maupun bidang operasional; (giat 5052/prog WA /SP4/SS3/IKP2/PPK prog 2, giat 3, renaksi 6, 7);
 - d) menyusun manajemen talenta persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif;
(giat 3108/prog BD /SP4/SS3/IKP2/PPK prog 3, giat 5, renaksi 18, 19);
 - e) menyiapkan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN;
(giat 3108/prog BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 21, 27);
- 2) melaksanakan rekrutmen, seleksi Dikbangum dan pembinaan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan rekrutmen anggota Polri secara proaktif dan terpadu berbasis T.I (Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward);
(giat 3107/prog BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 8, 9, 10, 12);
 - b) melaksanakan rencana Pendidikan Diktuba di SPN Polda Sumbar;
(giat 3096, 3100, /prog BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 4, 5, renaksi 11, 17, 21, 22);
 - c) melaksanakan.....

- c) melaksanakan seleksi Dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif; (giat 3107/prog BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 11);
- d) meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dan pengemban Polmas dalam menangani konflik so d) meningkatkan..... terjadi di masyarakat di bidang Kamtibmas, (giat 3100,5076 /prog BD, BQ /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3,giat 4, renaksi 16);
- 3) Perluasan kerja sama pendidikan di dalam negeri;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan perintisan kerja sama pendidikan Dagri; (giat 3100/prog BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 6, renaksi 24, 77);
- b) melaksanakan perpanjangan MoU kermadik Dagri; (giat 3100/prog BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 6, renaksi 24, 25);
- c) menyelenggarakan penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta clear and clean dengan menggunakan Computer Asisted Test (CAT) pada tingkat Polda; (giat 3107/prog BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 8, 9);
- 4) peningkatan pelaksanaan tatakelola *e-government* melalui *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-procurement* untuk mendukung kesejahteraan anggota Polri;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menggunakan Aplikasi Sirena secara bertahap; (giat3084,/prog BP /SP4/SS4/IKP4/PPK prog 4, giat 9, renaksi 33, 34);
- b) mengembangkan.....

- b) mengembangkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan informasi teknologi, baik hardware maupun software untuk mendukung aplikasi e-planning dan e-budgeting; (giat 3084/ prog BP /SP4/SS4/IKP4/PPK prog 4, giat 9, renaksi 33, 34);
 - c) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah;
(giat3100,/prog BD/SP4/SS3/IKP1/PPK prog3, giat 4, renaksi 13, 14);
 - d) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri termasuk penanganan pasien Covid-19;
(giat 3072, 3100/prog BD, WA /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 11, 14);
- 5) peningkatan pelaksanaan tatakelola *e-government* melalui *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-procurement* untuk mendukung kesejahteraan anggota Polri:
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menggunakan Aplikasi Sirena secara bertahap;
(giat3084,/prog BP /SP4/SS4/IKP4/PPK prog 4, giat 9, renaksi 33, 34);
 - b) mengembangkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan informasi teknologi, baik hardware maupun software untuk mendukung aplikasi e-planning dan e-budgeting; (giat 3084/ prog BP /SP4/SS4/IKP4/PPK prog 4, giat 9, renaksi 33, 34);
 - c) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah;
(giat3100,/prog BD/SP4/SS3/IKP1/PPK prog3, giat 4, renaksi 13, 14);
 - d) peningkatan

- d) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri termasuk penanganan pasien Covid-19;
(giat 3072, 3100/prog BD, WA /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 11, 14);
- 6) pelaksanaan Sistem Manajemen karir berbasis kinerja serta berdasarkan spesifikasi penugasan wilayah;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyempurnakan standar penilaian kompetensi serta meningkatkan “sistem reward and punishment”; (giat 3108/prog BD /SP4/SS3/IKP2/PPK prog 3, giat 5, renaksi 23);
- b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta”; (giat 3108/prog BD /SP4/SS3/IKP2/PPK prog 3, giat 5, renaksi 22);
- c) mengintegrasikan Sistem Manajemen Kinerja online dengan SIPP; (giat 3108/prog BD /SP4/SS3/IKP2/PPK prog 3, giat 5, renaksi 18);
- d) memperbanyak jumlah asesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus;
(giat 3100, 5076/prog BD, BQ /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 13);
- 7) peningkatan kesejahteraan melalui layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi aparaturnya Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama; (giat 3072/prog WA /SP4/SS5/IKP12/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);

b) melaksanakan.....

- b) melaksanakan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas;
(giat 3072, 3105/prog WA, BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 8, renaksi 30, 32);
 - c) melaksanakan pelayanan administrasi pegawai pada Polri berkaitan dengan Asabri; (giat 3105/prog BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 8, renaksi 29);
 - d) peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;
(giat 5062, 3072, 5052/prog BP, WA /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 8, renaksi 30,31);
 - e) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS);
(giat 5052, 3072/ prog WA /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 4, giat 10, renaksi 38, 39);
- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang Modern”**, yaitu:
- 1) pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan pembangunan rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polri;
(giat 5062/prog BP /SP5/SS4/IKP4/PPK prog 3, giat 8, renaksi 29);
 - b) melanjutkan pembangunan Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di wilayah perbatasan secara selektif prioritas dan berkelanjutan.
(giat 5062/prog BP /SP5/SS4/IKP4/PPK prog 4, 5, giat 10, 12, renaksi 38, 48);
- f. arah

f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penguatan Pengawasan yang Efektif Guna Memperkuat Integritas dan Tatakelola Organisasi yang baik”**, yaitu:

1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu; (giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP13/PPK prog 12, giat 42, renaksi 150);
- b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online; (giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP13/PPK prog 12, giat 42, renaksi 149, 167);
- c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal; (giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP13/PPK prog 15, giat 49, renaksi 171, 172, 174);

2) Penguatan Saber Pungli;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan sinergisitas Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas Pungli; (giat 3091/prog WA/SP6/SS5/IKP14/PPK/PPK prog 15, giat 48, renaksi 169);
- b) meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli; (giat 3091/prog WA/SP6/SS5/IKP14/PPK prog 15, giat 49, renaksi 166, 170);
- c) pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket) terkait Rekrutmen Pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS; (giat 5086/prog BI/SP6/SS1/IKU1/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168, 169);

d) pelaksanaan.....

- d) pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, SESPIMA, SESPIMMEN/PKN Tingkat 2, SESPIMTI/LEMHANAS dan PKN Tingkat 1; (giat 5086/prog BI /SP6/SS1/IKU1/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168, 169);
- e) pelaksanaan operasi Bersih terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan Publik (SIM, STNK,BPKB, SKCK); (giat 5086/prog BI /SP6/SS1/IKU1/PPK prog 16, giat 51, renaksi 176, 177);
- f) terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan sasaran pungutan liar yang terjadi pada lingkungan Polri; (giat 3091/ prog WA /SP6/SS5/IKP14/PPK prog 15, giat 48, renaksi 169);

3) Pencegahan Korupsi di internal Polri:

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi;
(giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP14/PPK prog 15, giat 49, renaksi 170, 173);
- b) meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi; (giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP14/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168, 169);
- c) sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; (giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP14/PPK prog 14, giat 47, renaksi 165);

4) meningkatkan

4) meningkatkan tatakelola manajemen perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel:

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menginput data ke aplikasi terkait perencanaan dan penganggaran Polri;
(giat 5054 /prog WA /SP6/SS5/IKP11/PPK prog 4, giat 10, renaksi 38, 140);
- b) meningkatkan sinergisitas dalam menyusun produk perencanaan Polda Sumbar (Rancangan Renja dan Renja Polda, Satker dan Satwil) guna mensinkronkan pembangunan di Polri agar semakin berkualitas;
(giat 5051/prog WA /SP6/SS5/IKP7/PPK prog 14, giat 47, renaksi 163);
- c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi logistik, fungsi keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tatakelola keuangan pada tingkat Satker; (giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP8/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168);
- d) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan; (giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP11/PPK prog 14, giat 47, renaksi 163);
- e) melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dan anggaran baik di bidang pembinaan dan operasional; (giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP11/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162);

5) Penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polsek serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan efisien;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

- a) pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada

daerah.....

- daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan); (giat 5052/prog WA /SP6/SS5/IKP10,12/PPK prog 1, giat 1, renaksi 1, 2);
- b) penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya; (giat 5052/prog WA /SP6/SS5/IKP10/PPK prog 1, giat 1, renaksi 3);
 - c) melaksanakan penyempurnaan peraturan tentang SOTK tingkat Polda;
(giat 5052/prog WA /SP4/SS5/IKP10/PPK prog 1, giat 2, renaksi 4,5);
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri dalam rangka *good governance clean government*;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menyelenggarakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh jajaran Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat; (giat 5053/prog WA /SP6/SS5/IKP10/PPK prog 11, giat 38, renaksi 139, 140);
- b) melanjutkan pelaksanaan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/ Polresta, agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri; (giat 5053/prog WA /SP6/SS5/IKP10/PPK prog 11, giat 138, renaksi 140);
- c) melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi

pelayanan.....

- Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi, sehingga lebih besar peluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik; (giat 5053/ prog WA /SP6/SS5/IKP10/PPK prog 11, giat 38, renaksi 139, 140);
- d) mempertahankan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;
(giat 5053/prog WA /SP6/SS5/IKP10/PPK prog 11, giat 39, renaksi 140);
- e) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola (ITK) Polri berbasis web dan mobile secara online (ITK-O) tingkat Polres Metro/Polrestabes/Polresta/Polres dan Satker Polda; (giat 5053/prog WA /SP6/SS5/IKP10/PPK prog 12, giat 41, renaksi 146).

7. Arah kebijakan dan strategi Itwasda Polda Sumbar Tahun 2023

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Itwasda Polda Sumbar Tahun 2023, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Menjadikan personel APIP yang berkualitas dan professional”, yaitu:
- 1) Melaksanakan peningkatan kemampuan APIP yang berkualitas dan professional dengan mengikuti diklat secara bertahap dan berkesinambungan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
Terselenggaranya Bimtek (Prog WA, giat 3073)
 - 2) Mengoptimalkan pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan personel;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Melaksanakan.....

Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan perosnel; (Prog WA, giat 3073)

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar menjadi taat, hemat, efisien, dan efektif dalam pencapaian tugas dan fungsi”, yaitu:

1) melaksanakan kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan

b) Terselenggaranya Audit Kinerja

c) Terselenggaranya Audit dengan tujuan tertentu

2) Pemeliharaan kantor/pemeliharaan peralatan dan mesin.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan kendaraan (Prog BP, giat 5059).

c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ setiap Kasatker dan Kasatwil yang akan melaksanakan serah terima jabatan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pada bidang opsnal, SDM, sarpras, dan keuangan”, yaitu:

melaksanakan kegiatan Verifikasi terhadap adanya mutasi kepala satuan kerja ketempat yang baru sehingga pelaksanaan kinerja pejabat yang lama dapat dipertanggungjawabkan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Terselenggaranya Verifikasi (Prog WA, giat 3091);

d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar yang direviu dan evaluasi sehingga laporan dapat diyakini”, yaitu:

melaksanakan.....

melaksanakan revidu atas laporan keuangan, revidu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), evaluasi AKIP, evaluasi Penilaian Mandiri Penyusunan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan evaluasi Zona Integritas (ZI) diharapkan menghasilkan laporan yang berkualitas;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Terselenggaranya revidu dan evaluasi (Prog WA, giat 3073);

- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ setiap pengaduan masyarakat yang dilaporkan baik langsung maupun tidak langsung dapat ditindak lanjuti”, yaitu:

Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan, klarifikasi, konfirmasi, pemeriksaan dan penelitian setiap pengaduan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Prog WA, giat 3091)

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif T.A. 2023

8. Program dan Kegiatan

- a. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri.

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparatur Polri khususnya pada Itwasda Polda Sumbar guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan:

- a) Dukungan manajemen dan tekhnis sarpras.

b. Program.....

b. Program dukungan manajemen.

1) Tujuan:

Terwujudnya good governance dan clean government melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta integrasi lintas sector.

2) Kegiatan:

- a) Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
- b) Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan.

9. Pagu Indikatif Itwasda Polda Sumbar TA. 2023.

Alokasi pagu indikatif Itwasda Polda Sumbar TA. 2023 sebesar Rp. **4.256.926.000,-** (Empat milyar dua ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri Rp.105.662.000,- (Seratus lima juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) meliputi :
 - 1) Dukungan manajemen dan teknik sarpras Rp. 105 .662.000,-(Seratus lima juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- b. Program dukungan manajemen Rp. 4.151.264.000,- (empat milyar satu ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) meliputi :
 - 1) Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri Rp. 3.330.159.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
 - 2) Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan Rp. 821.105.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta seratus lima ribu rupiah).

V. Penutup.....

PENUTUP

Demikian Rancangan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan T.A. 2023.

Ditetapkan di: Padang
pada tanggal:

31

Januari

2022

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR



ARIF RAHMAN HAKIM, S.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050542

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH**



**RANCANGAN RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Lampiran

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
NOMOR : KEP/3/II/REN.2.3./2022 TANGGAL 31 JANUARI 2022**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH



**RANCANGAN RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

RKT

KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
NOMOR : KEP/3/I/REN.2.3./2022 TANGGAL 31 JANUARI 2022

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SUMATERA BARAT
 INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
 ITWASDA POLDA SUMBAR TA 2023

| SASARAN STRATEGI | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET | KET |
|------------------|--|-------------------|---|--------|-----|
| SS1 | Profesionalisme SDM Itwasda Polda Sumbar | IKU1 | Indeks Profesionalitas SDM Itwasda Polda Sumbar | 47 | |
| | | IKP2 | Terselenggaranya diklat profesi oleh BPKP | 14 | |
| | | IKP3 | Terselenggaranya Bimtek | 1 | |
| SS2 | Modernisasi teknologi Itwasda Polda Sumbar | IKP4 | Persentase Pemenuhan Ketersediaan ADK pada Almtsus Itwasda Polda Sumbar | 60% | |
| SS3 | Sistem pengawasan Itwasda Polda Sumbar yang akuntabel guna mendukung tata Kelola pemerintah yang bersih dan melayani | IKP5 | Nilai SAKIP | 72,00 | |
| | | IKP6 | Nilai Kinerja Anggaran | 93,00 | |
| | | IKP7 | Terselenggaranya Audit Kinerja | 2 | |
| | | IKP8 | Terselenggaranya Audit Tujuan Tertentu | 17 | |
| | | IKP9 | Terselenggaranya Verifikasi | 27 | |
| | | IKP10 | Terselenggaranya Reviu dan Evaluasi | 5 | |
| | | IKU11 | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat | 95% | |

Ditetapkan di : Padang
 pada tanggal : 31 Januari 2022

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR



ARIF RAHMAN HAKIM, S.H
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67110374

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH**



**RANCANGAN RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

RKA-KL

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
NOMOR : KEP/3/I/REN.2.3./2022 TANGGAL 31 JANUARI 2022**

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp.4,256,926,000

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL | PERHITUNGAN TAHUN 2023 | | | SD/ CP |
|--------------|---|------------------------|--------------|---------------|-----------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 060.01.BP | Program Modernisasi Almsatus dan Sarana Prasarana Polri | | | 105,662,000 | |
| 5059 | Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras | | | 105,662,000 | |
| 5059.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] | 1.0 Layanan | | 105,662,000 | |
| ----- | | | | | |
| | Lokasi : KOTA PADANG | | | | |
| 5059.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 1.0 Layanan | | 105,662,000 | |
| 002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | | 105,662,000 | |
| AY | PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10 | | | 86,800,000 | |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | 86,800,000 | RM |
| | (KPPN.010-Padang) | | | | |
| | - Kendaraan Roda 4 | 7.0 UNIT | 12,400,000 | 86,800,000 | |
| BB | PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 | | | 9,000,000 | |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | 9,000,000 | RM |
| | (KPPN.010-Padang) | | | | |
| | - Kendaraan Roda 2 | 3.0 UNIT | 3,000,000 | 9,000,000 | |
| BH | PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR | | | 9,862,000 | |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | 9,862,000 | RM |
| | (KPPN.010-Padang) | | | | |
| | - Pemeliharaan Personel Komputer | 6.0 UNIT | 730,000 | 4,380,000 | |
| | - Pemeliharaan Printer | 5.0 UNIT | 690,000 | 3,450,000 | |
| | - Mesin Foto Copy | 1.0 UNIT | 2,032,000 | 2,032,000 | |
| 060.01.WA | Program Dukungan Manajemen | | | 4,151,264,000 | |
| 3073 | Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri | | | 3,330,159,000 | |
| 3073.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] | 2.0 Layanan | | 3,330,159,000 | |
| ----- | | | | | |
| | Lokasi : KOTA PADANG | | | | |
| 3073.EBA.962 | Layanan Umum | 1.0 Layanan | | 136,432,000 | |
| 003 | Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan | | | 136,432,000 | |
| AD | RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI | | | 21,690,000 | |
| 521211 | Belanja Bahan | | | 21,690,000 | RM |
| | (KPPN.010-Padang) | | | | |
| | > RAPAT KLARIFIKASI PENANGANAN DUMAS | | | 6,930,000 | |
| | - Makan [14 ORG x 11 GIAT x 1 HARI x 1 KALI | 154.0 OK | 30,000 | 4,620,000 | |
| | - Snack [14 ORG x 11 GIAT x 1 HARI x 1 KALI | 154.0 OK | 15,000 | 2,310,000 | |
| | > RAPAT STAF/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA | | | 4,050,000 | |
| | - Makan [15 ORG x 6 GIAT x 1 HARI x 1 KALI | 90.0 OK | 30,000 | 2,700,000 | |
| | - Snack [15 ORG x 6 GIAT x 1 HARI x 1 KALI | 90.0 OK | 15,000 | 1,350,000 | |
| | > RAKERNIS FUNGSI PENGAWASAN | | | 10,710,000 | |
| | >> RAPAT PERSIAPAN | | 0 | 450,000 | |
| | - Makan [10 ORG x 1 GIAT x 1 KALI] | 10.0 OK | 30,000 | 300,000 | |
| | - Snack [10 ORG x 1 GIAT x 1 KALI] | 10.0 OK | 15,000 | 150,000 | |
| | >> PELAKSANAAN | | 0 | 10,260,000 | |
| | - Makan [114 ORG x 1 GIAT x 2 HARI x 1 KALI | 228.0 OK | 30,000 | 6,840,000 | |
| | - Snack [114 ORG x 1 GIAT x 2 HARI x 1 KALI | 228.0 OK | 15,000 | 3,420,000 | |
| AG | SOSIALISASI | | | 1,200,000 | |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
 ALOKASI Rp. 4,256,926,000

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL | PERHITUNGAN TAHUN 2023 | | | SD/ CP |
|-----------|---|------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 521211 | Belanja Bahan (KPPN.010-Padang) | | | 1,200,000 | RM |
| | > SOSIALISASI DIPA RKA K/L | | | 1,200,000 | |
| | - Makan [20 ORG x 1 GIAT x 1 KALI] | 20.0 OK | 30,000 | 600,000 | |
| | - Snack [20 ORG x 1 GIAT x 2 KALI] | 40.0 OK | 15,000 | 600,000 | |
| <i>BU</i> | <i>EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN</i> | | | <i>77,225,000</i> | |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
 ALOKASI Rp. 4,256,926,000

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL | PERHITUNGAN TAHUN 2023 | | | SD/ CP |
|--------|---|------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 521211 | Belanja Bahan (KPPN.010-Padang) | | | 47,825,000 | RM |
| | > REVIU LAPORAN KEUANGAN | | | 18,320,000 | |
| | >> DUK MAKAN SNACK RAPAT PERSIAPAN/PELAPORAN | | 0 | 1,260,000 | |
| | - Makan [14 ORG x 2 GIAT x 1 HARI x 1 KALI | 28.0 OK | 30,000 | 840,000 | |
| | - Snack [14 ORG x 2 GIAT x 1 HARI x 1 KALI | 28.0 OK | 15,000 | 420,000 | |
| | >> DUK ATK | | 0 | 500,000 | |
| | - Spanduk [1 LMBR x 2 GIAT] | 2.0 LMBR | 250,000 | 500,000 | |
| | >> DUK MAKAN SNACK PESERTA DAN PEREVIU | | 0 | 16,560,000 | |
| | - Makan [92 ORG x 2 GIAT x 2 HARI x 1 KALI | 368.0 OK | 30,000 | 11,040,000 | |
| | - Snack [92 ORG x 2 GIAT x 2 HARI x 1 KALI | 368.0 OK | 15,000 | 5,520,000 | |
| | > REVIU LKIP POLDA | | | 1,350,000 | |
| | - Makan [10 ORG x 1 GIAT x 3 HARI x 1 KALI | 30.0 OK | 30,000 | 900,000 | |
| | - Snack [10 ORG x 1 GIAT x 3 HARI x 1 KALI | 30.0 OK | 15,000 | 450,000 | |
| | > REVIU/REVISI RKA K/L | | | 5,130,000 | |
| | - Makan [114 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI | 114.0 OK | 30,000 | 3,420,000 | |
| | - Snack [114 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI | 114.0 OK | 15,000 | 1,710,000 | |
| | > EVALUASI/PENILAIAN SAKIP | | | 5,430,000 | |
| | >> DUK SPANDUK | | 0 | 300,000 | |
| | - Spanduk [1 BUAH x 1 GIAT] | 1.0 LMBR | 300,000 | 300,000 | |
| | >> DUK MAKAN SNACK PESERTA | | 0 | 4,230,000 | |
| | - Makan [94 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI | 94.0 OK | 30,000 | 2,820,000 | |
| | - Snack [94 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI | 94.0 OK | 15,000 | 1,410,000 | |
| | >> DUK MAKAN SNACK PANITIA | | 0 | 900,000 | |
| | - Makan [20 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI | 20.0 OK | 30,000 | 600,000 | |
| | - Snack [20 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI | 20.0 OK | 15,000 | 300,000 | |
| | > EVALUASI ZI | | | 13,590,000 | |
| | >> DUK MAKAN SNACK PESERTA | | 0 | 11,790,000 | |
| | - Makan [131 ORG x 1 GIAT x 2 HARI x 1 KALI | 262.0 OK | 30,000 | 7,860,000 | |
| | - Snack [131 ORG x 1 GIAT x 2 HARI x 1 KALI | 262.0 OK | 15,000 | 3,930,000 | |
| | >> DUK MAKAN SNACK PANITIA | | 0 | 1,800,000 | |
| | - Makan [20 ORG x 1 GIAT x 2 HARI x 1 KALI | 40.0 OK | 30,000 | 1,200,000 | |
| | - Snack [20 ORG x 1 GIAT x 2 HARI x 1 KALI | 40.0 OK | 15,000 | 600,000 | |
| | > EVALUASI/PENILAIAN PMPRB | | | 4,005,000 | |
| | >> DUK MAKAN SNACK PESERTA | | 0 | 3,105,000 | |
| | - Makan [69 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI | 69.0 OK | 30,000 | 2,070,000 | |
| | - Snack [69 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI | 69.0 OK | 15,000 | 1,035,000 | |
| | >> DUK MAKAN SNACK PANITIA | | 0 | 900,000 | |
| | - Makan [20 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI | 20.0 OK | 30,000 | 600,000 | |
| | - Snack [20 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI | 20.0 OK | 15,000 | 300,000 | |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 4,256,926,000

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL | PERHITUNGAN TAHUN 2023 | | | SD/ CP |
|--------|---|------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.010-Padang) | | | 29,400,000 | RM |
| | > EVALUASI SERTA PELAKSANAAN PENILAIAN ZI | | | 29,400,000 | |
| | - Penginapan [6 ORG x 1 GIAT x 7 RES x 1 MALAM | 42.0 OH | 300,000 | 12,600,000 | |
| | - Uangan harian [6 ORG x 1 GIAT x 7 RES x 2 HARI | 84.0 OH | 200,000 | 16,800,000 | |
| CZ | PENYELENGGRAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN | | | 1,080,000 | |
| 521211 | Belanja Bahan (KPPN.010-Padang) | | | 1,080,000 | RM |
| | - Makan [6 ORG x 2 GIAT x 2 HARI x 1 KALI | 24.0 OK | 30,000 | 720,000 | |
| | - Snack [6 ORG x 2 GIAT x 2 HARI x 1 KALI | 24.0 OK | 15,000 | 360,000 | |
| DX | PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONEL SATKER | | | 12,305,000 | |
| 521211 | Belanja Bahan (KPPN.010-Padang) | | | 7,805,000 | RM |
| | > BINTEK FUNGSI PENGAWASAN | | | 7,805,000 | |
| | >> DUK SPANDUK | | 0 | 205,000 | |
| | - Spanduk | 1.0 LMBR | 205,000 | 205,000 | |
| | >> DUK MAKAN SNACK | | 0 | 7,600,000 | |
| | - Makan [76 ORG x 1 GIAT x 2 HARI x 1 KALI | 152.0 OK | 35,000 | 5,320,000 | |
| | - Snack [76 ORG x 1 GIAT x 2 HARI x 1 KALI | 152.0 OK | 15,000 | 2,280,000 | |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi (KPPN.010-Padang) | | | 4,500,000 | RM |
| | > BIAYA NARASUMBER | | | 4,500,000 | |
| | - Biaya narasumber/pemapar [5 ORG x 1 GIAT x 1 JAM] | 5.0 OJ | 900,000 | 4,500,000 | |
| G | PENYUSUNAN EVALUASI LKIP | | | 450,000 | |
| 521211 | Belanja Bahan (KPPN.010-Padang) | | | 450,000 | RM |
| | > PENYUSUNAN EVALUASI LKIP ITWASDA | | | 450,000 | |
| | - Makan [10 ORG x 1 GIAT x 1 KALI] | 10.0 OK | 30,000 | 300,000 | |
| | - Snack [10 ORG x 1 GIAT x 1 KALI] | 10.0 OK | 15,000 | 150,000 | |
| JZ | HONORARIUM SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP/PENGELOLA KEUANGAN | | | 3,600,000 | |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.010-Padang) | | | 3,600,000 | RM |
| | - Honor Operator SIRENA [1 ORG x 12 BLN] | 12.0 OB | 300,000 | 3,600,000 | |
| N | PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH/UANG MAKAN PNS | | | 18,882,000 | |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 4,256,926,000

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL | PERHITUNGAN TAHUN 2023 | | | SD/ CP |
|---------------------|--|------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 521113 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (KPPN.010-Padang) | | | 18,882,000 | RM |
| | > OPERATOR SAKTI | | | 2,106,000 | |
| | - Menyusun Anggaran [1 ORG x 117 HARI] | 117.0 OH | 18,000 | 2,106,000 | |
| | > OPERATOR E-MONEV | | | 2,106,000 | |
| | - Menginput Realisasi Anggaran [1 ORG x 117 HARI] | 117.0 OH | 18,000 | 2,106,000 | |
| | > OPERATOR SMART | | | 2,106,000 | |
| | - Mengkonfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran Satker [1 ORG x 117 HARI] | 117.0 OH | 18,000 | 2,106,000 | |
| | > OPERATOR SIMAK | | | 2,106,000 | |
| | - Mendatakan Barang Milik Negara [1 ORG x 117 HARI] | 117.0 OH | 18,000 | 2,106,000 | |
| | > OPERATOR PPABP | | | 2,106,000 | |
| | - Membuat Nominatif Gaji/Tunjin [1 ORG x 117 HARI] | 117.0 OH | 18,000 | 2,106,000 | |
| | > OPERATOR SAIBA | | | 2,088,000 | |
| | - Menginput data SPM dan SP2D [1 ORG x 116 HARI] | 116.0 OH | 18,000 | 2,088,000 | |
| | > OPERATOR SAS | | | 2,088,000 | |
| | - Membuat SPM dan SP2D [1 ORG x 116 HARI] | 116.0 OH | 18,000 | 2,088,000 | |
| | > OPERATOR 17 KOMPONEN | | | 2,088,000 | |
| | - Menyusun dan Melaporkan Giat TW I - IV [1 ORG x 116 HARI] | 116.0 OH | 18,000 | 2,088,000 | |
| | > OPERATOR E-KINERJA | | | 2,088,000 | |
| | - Menyusun giat masing-masing personel [1 ORG x 116 HARI] | 116.0 OH | 18,000 | 2,088,000 | |
| 3073.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 1.0 Layanan | | 3,193,727,000 | |
| 001 | Gaji dan Tunjangan | | | 3,133,707,000 | U |
| A | Pembayaran gaji dan tunjangan | | | 3,133,707,000 | |
| 511161 | Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (KPPN.010-Padang) | | | 283,211,000 | RM |
| | - Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri | 1.0 THN | 242,619,000 | 242,619,000 | |
| | - Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13) | 1.0 BLN | 20,296,000 | 20,296,000 | |
| | - Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14) | 1.0 BLN | 20,296,000 | 20,296,000 | |
| 511169 | Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (KPPN.010-Padang) | | | 6,000 | RM |
| | - Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri | 1.0 THN | 4,000 | 4,000 | |
| | - Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13) | 1.0 BLN | 1,000 | 1,000 | |
| | - Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 14) | 1.0 BLN | 1,000 | 1,000 | |
| 511171 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (KPPN.010-Padang) | | | 12,935,000 | RM |
| | - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri | 1.0 THN | 11,087,000 | 11,087,000 | |
| | - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13) | 1.0 BLN | 924,000 | 924,000 | |
| | - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14) | 1.0 BLN | 924,000 | 924,000 | |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
 ALOKASI Rp. 4,256,926,000

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL | PERHITUNGAN TAHUN 2023 | | | SD/ CP |
|--------|---|------------------------|---------------|---------------|-----------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 511172 | <u>Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang) | | | 7,540,000 | RM |
| | - Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri | 1.0 THN | 6,458,000 | 6,458,000 | |
| | - Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13) | 1.0 BLN | 541,000 | 541,000 | |
| | - Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14) | 1.0 BLN | 541,000 | 541,000 | |
| 511173 | <u>Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang) | | | 35,700,000 | RM |
| | - Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri | 1.0 THN | 30,600,000 | 30,600,000 | |
| | - Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13) | 1.0 BLN | 2,550,000 | 2,550,000 | |
| | - Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14) | 1.0 BLN | 2,550,000 | 2,550,000 | |
| 511175 | <u>Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang) | | | 2,105,000 | RM |
| | - Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri | 1.0 THN | 1,779,000 | 1,779,000 | |
| | - Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13) | 1.0 BLN | 163,000 | 163,000 | |
| | - Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14) | 1.0 BLN | 163,000 | 163,000 | |
| 511176 | <u>Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang) | | | 9,225,000 | RM |
| | - Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri | 1.0 THN | 9,225,000 | 9,225,000 | |
| 511179 | <u>Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang) | | | 47,520,000 | RM |
| | - Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri | 1.0 THN | 47,520,000 | 47,520,000 | |
| 511193 | <u>Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang) | | | 2,520,000 | RM |
| | - Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri | 1.0 THN | 2,160,000 | 2,160,000 | |
| | - Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13) | 1.0 BLN | 180,000 | 180,000 | |
| | - Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14) | 1.0 BLN | 180,000 | 180,000 | |
| 511211 | <u>Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang) | | | 1,463,551,000 | RM |
| | - Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI | 1.0 THN | 1,215,745,000 | 1,215,745,000 | |
| | - Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 13) | 1.0 BLN | 123,903,000 | 123,903,000 | |
| | - Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 14) | 1.0 BLN | 123,903,000 | 123,903,000 | |
| 511219 | <u>Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang) | | | 19,000 | RM |
| | - Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI | 1.0 THN | 15,000 | 15,000 | |
| | - Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13) | 1.0 BLN | 2,000 | 2,000 | |
| | - Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14) | 1.0 BLN | 2,000 | 2,000 | |
| 511221 | <u>Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang) | | | 105,872,000 | RM |
| | - Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI | 1.0 THN | 90,746,000 | 90,746,000 | |
| | - Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji 13) | 1.0 BLN | 7,563,000 | 7,563,000 | |
| | - Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji 14) | 1.0 BLN | 7,563,000 | 7,563,000 | |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 4,256,926,000

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL | PERHITUNGAN TAHUN 2023 | | | SD/ CP |
|------------|---|------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 511222 | <u>Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang) | | | 34,559,000 | RM |
| | - Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI | 1.0 THN | 29,621,000 | 29,621,000 | |
| | - Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji 13) | 1.0 BLN | 2,469,000 | 2,469,000 | |
| | - Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji 14) | 1.0 BLN | 2,469,000 | 2,469,000 | |
| 511223 | <u>Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang) | | | 236,810,000 | RM |
| | - Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI | 1.0 THN | 202,980,000 | 202,980,000 | |
| | - Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 13) | 1.0 BLN | 16,915,000 | 16,915,000 | |
| | - Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 14) | 1.0 BLN | 16,915,000 | 16,915,000 | |
| 511225 | <u>Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang) | | | 25,373,000 | RM |
| | - Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI | 1.0 THN | 21,747,000 | 21,747,000 | |
| | - Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI (gaji ke 13) | 1.0 BLN | 1,813,000 | 1,813,000 | |
| | - Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI (gaji ke 14) | 1.0 BLN | 1,813,000 | 1,813,000 | |
| 511226 | <u>Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang) | | | 109,583,000 | RM |
| | - Belanja Tunjangan Beras TNI/POLRI | 1.0 THN | 109,583,000 | 109,583,000 | |
| 511228 | <u>Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang) | | | 669,600,000 | RM |
| | - Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI | 1.0 THN | 669,600,000 | 669,600,000 | |
| 511232 | <u>Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang) | | | 5,600,000 | RM |
| | - Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI | 1.0 THN | 4,800,000 | 4,800,000 | |
| | - Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI (gaji ke 13) | 1.0 BLN | 400,000 | 400,000 | |
| | - Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI (gaji ke 14) | 1.0 BLN | 400,000 | 400,000 | |
| 511244 | <u>Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang) | | | 13,650,000 | RM |
| | - Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri | 1.0 THN | 11,700,000 | 11,700,000 | |
| | - Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 13) | 1.0 BLN | 975,000 | 975,000 | |
| | - Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 14) | 1.0 BLN | 975,000 | 975,000 | |
| 512211 | <u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.010-Padang) | | | 68,328,000 | RM |
| | > UANG LEMBUR | | | 34,632,000 | |
| | - Golongan II [3 ORG x 2 JAM x 13 HARI x 12 BLN] | 936.0 OJ | 17,000 | 15,912,000 | |
| | - Golongan III [3 ORG x 2 JAM x 13 HARI x 12 BLN] | 936.0 OJ | 20,000 | 18,720,000 | |
| | > UANG MAKAN LEMBUR | | | 33,696,000 | |
| | - Golongan II [3 ORG x 13 HARI x 12 BLN] | 468.0 OH | 35,000 | 16,380,000 | |
| | - Golongan III [3 ORG x 13 HARI x 12 BLN] | 468.0 OH | 37,000 | 17,316,000 | |
| 002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | | 60,020,000 | |
| <i>BW</i> | <i>PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR</i> | | | <i>60,020,000</i> | |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
 ALOKASI Rp. 4,256,926,000

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL | PERHITUNGAN TAHUN 2023 | | | SD/ CP |
|--------------|--|------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.010-Padang) | | | 60,020,000 | RM |
| | - Bekal kantor | 40.0 OT | 1,500,500 | 60,020,000 | |
| 3091 | Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan | | | 821,105,000 | |
| 3091.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line] | 79.0 Dokumen | | 821,105,000 | |
| 3091.EBD.965 | Lokasi : KOTA PADANG Layanan Audit Internal | 79.0 Dokumen | | 821,105,000 | |
| 003 | Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan | | | 821,105,000 | |
| CU | PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN | | | 638,502,000 | |
| 522141 | Belanja Sewa (KPPN.010-Padang) | | | 51,638,000 | RM |
| | > BELANJA SEWA KENDARAAN RODA 4 PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN | | | 51,638,000 | |
| | - Sewa Kendaraan [1 UNIT x 6 GIAT x 12 RES x 2 HARI | 144.0 HARI | 358,600 | 51,638,000 | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.010-Padang) | | | 523,864,000 | RM |
| | > BELANJA PERJALNAN DINAS BIASA DUK TRANSPORTASI LAUT/KAPAL | | | 10,000,000 | |
| | - Duk Transportasi Laut/Kapal pemeriksaan dan pengawasan [4 ORG x 5 GIAT x 1 RES] | 20.0 HARI | 500,000 | 10,000,000 | |
| | > BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN | | | 513,864,000 | |
| | >> PAMEN / PNS GOL.IV | | 0 | 172,800,000 | |
| | - Penginapan [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 1 MALAM | 216.0 OH | 300,000 | 64,800,000 | |
| | - Uang Harian [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 2 HARI | 432.0 OH | 250,000 | 108,000,000 | |
| | >> PAMA / PNS GOL.III | | 0 | 172,800,000 | |
| | - Penginapan [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 1 MALAM | 216.0 OH | 300,000 | 64,800,000 | |
| | - Uang Harian [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 2 HARI | 432.0 OH | 250,000 | 108,000,000 | |
| | >> BINTARA / PNS GOL.II | | 0 | 168,264,000 | |
| | - Penginapan [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 1 MALAM | 216.0 OH | 285,000 | 61,560,000 | |
| | - Uang Harian [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 2 HARI | 432.0 OH | 247,000 | 106,704,000 | |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.010-Padang) | | | 63,000,000 | RM |
| | > BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN | | | 63,000,000 | |
| | - Uang harian pemeriksaan dan pengawasan [5 ORG x 6 GIAT x 14 STKR x 1 HARI | 420.0 HARI | 150,000 | 63,000,000 | |
| JZ | HONORARIUM SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP/PENGELOLA KEUANGAN | | | 64,913,000 | |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.010-Padang) | | | 64,913,000 | RM |
| | > HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN OPERATOR | | | 64,913,000 | |
| | - Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN] | 12.0 OB | 1,900,000 | 22,800,000 | |
| | - Honor Pejabat Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN] | 12.0 OB | 709,450 | 8,513,000 | |
| | - Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] | 12.0 OB | 700,000 | 8,400,000 | |
| | - Honor Operator SIMAK [2 ORG x 12 BLN] | 24.0 OB | 150,000 | 3,600,000 | |
| | - Honor Staf Pengelola Keuangan [6 ORG x 12 BLN] | 72.0 OB | 300,000 | 21,600,000 | |
| N | PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH/UANG MAKAN PNS | | | 3,600,000 | |

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
 UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
 ALOKASI Rp. 4,256,926,000

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL | PERHITUNGAN TAHUN 2023 | | | SD/ CP |
|--------|---|------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH BIAYA | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 521113 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (KPPN.010-Padang) | | | 3,600,000 | RM |
| | - OPERATOR E SABER PUNGLI | 200.0 HARI | 18,000 | 3,600,000 | |
| VJ | KEGIATAN 1 PRIORITAS POLRI | | | 114,090,000 | |
| 521211 | Belanja Bahan (KPPN.010-Padang) | | | 45,840,000 | RM |
| | > ATK | | | 24,000,000 | |
| | - ATK Rapat Penanganan Dumas Terpadu | 12.0 GIAT | 1,000,000 | 12,000,000 | |
| | - ATK Investigasi Dumas Terpadu | 12.0 GIAT | 1,000,000 | 12,000,000 | |
| | > RAPAT PENANGANAN DUMAS TERPADU | | | 21,840,000 | |
| | - Makan [10 ORG x 1 KALI x 12 BULAN] | 120.0 OK | 35,000 | 4,200,000 | |
| | - Snack [10 ORG x 1 KALI x 12 BULAN] | 120.0 OK | 17,000 | 2,040,000 | |
| | - Uang Harian [10 ORG x 1 KALI x 12 BULAN] | 120.0 OK | 130,000 | 15,600,000 | |
| 522141 | Belanja Sewa (KPPN.010-Padang) | | | 6,300,000 | RM |
| | > BIAYA INVESTIGASI DUMAS TERPADU | | | 6,300,000 | |
| | - Sewa Kendaraan [1 UNIT x 18 HARI] | 18.0 UNIT | 350,000 | 6,300,000 | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.010-Padang) | | | 61,950,000 | RM |
| | > BIAYA INVESTIGASI DUMAS TERPADU | | | 61,950,000 | |
| | >> DALAM KOTA | | 0 | 2,250,000 | |
| | - Uang Harian Pamen [1 ORG x 3 HARI] | 3.0 OH | 150,000 | 450,000 | |
| | - Uang Harian Pama [3 ORG x 3 HARI] | 9.0 OH | 150,000 | 1,350,000 | |
| | - Uang Harian Bintara [1 ORG x 3 HARI] | 3.0 OH | 150,000 | 450,000 | |
| | >> LUAR KOTA DALAM PROVINSI | | 0 | 59,700,000 | |
| | - Uang Harian Pamen [1 ORG x 18 HARI] | 18.0 OH | 380,000 | 6,840,000 | |
| | - Uang Harian Pama [3 ORG x 18 HARI] | 54.0 OH | 380,000 | 20,520,000 | |
| | - Uang Harian Bintara [1 ORG x 18 HARI] | 18.0 OH | 380,000 | 6,840,000 | |
| | - Penginapan Pamen [1 ORG x 17 MALAM] | 17.0 OH | 300,000 | 5,100,000 | |
| | - Penginapan Pama [3 ORG x 17 MALAM] | 51.0 OH | 300,000 | 15,300,000 | |
| | - Penginapan Bintara [1 ORG x 17 MALAM] | 17.0 OH | 300,000 | 5,100,000 | |

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

PADANG, 18 Januari 2022

ARIF RAHMAN HAKIM,S.H.
 KOMBESPOL 66050542